



► PROYEK PEMERINTAH

Diputus Kontrak, Satu Rekanan Terancam Blacklist

SLEMAN—Pemkab Sleman bakal menjatuhkan sanksi *blacklist* kepada rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan gedung kelas baru di SMP Negeri 2 Mlati. Hal ini dilakukan karena rekanan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati.

David Kurniawan
 david@harianjogja.com

► **Proyek di SMP Negeri 2 Mlati tak sesuai rencana karena rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.**

► **Sesuai regulasi dari Pemerintah Pusat, *blacklist* dikenakan satu hingga dua tahun.**

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sleman, Nur Fitri Handayani, mengatakan tahun ini ada 10 paket strategis daerah yang dikerjakan, salah satunya pembangunan gedung kelas baru di SMP Negeri 2 Mlati.

Total proyek ini senilai Rp821,7 juta dan direncanakan selesai pada 16 Desember 2024. Namun, pelaksanaan pembangunan tak sesuai rencana karena rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.

“Sempat dikerjakan, tapi kemudian kontraktor menyatakan tidak sanggup menyelesaikannya. Ini diperkuat adanya pernyataan tertulis dari rekanan tersebut,” kata Nur, Minggu (29/12).

Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Selain diputus kontrak, rekanan juga terkena sanksi uang jaminan



PAKET PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH DI SLEMAN

- Pembangunan Gedung Pusat Layanan Terpadu di Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp4,25 miliar
- Rehabilitasi Unit Balai Benih Ikan (BBI) Sempu di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan senilai Rp1,1 miliar.
- Pembangunan SPAM jaringan perpipaan KSPN Prambanan Rp2,1 miliar Rehabilitasi Daerah Irigasi Kringinan, Widodomartani, Ngemplak senilai Rp1,09 miliar
- Proyek Peningkatan Jalan Blembem-Tanen Rp5,77 miliar
- Proyek Peningkatan Jembatan Gajah Kuning Rp2,9 miliar.
- Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Caturharjo, Sleman senilai Rp1 miliar
- Konstruksi Bangunan Gedung Sarana Penunjang RSUD Prambanan senilai Rp12,77 miliar.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Mlati senilai Rp821,7 juta.

Sumber: Setda Sleman

pelaksanaan pekerjaan yang telah disetor ke kas daerah tidak bisa diambil. “Selain itu, kontraktor juga terkena *blacklist*,” katanya.

Meski demikian, Nur belum bisa membeberkan berapa lama *blacklist* diberlakukan kepada kontraktor ini. Dia beralih, kepastian masih menunggu usulan dari kuasa pengguna anggaran yang memiliki program pembangunan. “Sesuai regulasi dari Pemerintah Pusat, *blacklist* dikenakan satu hingga dua tahun. Tapi, untuk kepastiannya kami masih harus melakukan kajian terhadap usulan dari Dinas Pendidikan Sleman selaku kuasa pengguna anggaran,” katanya.

Pengawasan

Nur mengatakan, dari 10 proyek yang dilaksanakan, mayoritas proyek telah selesai dikerjakan. Dari 10 program, yang sudah selesai sebanyak delapan kegiatan.

“Yang belum selesai adalah pembangunan gedung di RSUD Prambanan. Sedangkan untuk pembangunan gedung baru di SMPN 2 Mlati, kontraktor menyerah

karena tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan,” katanya.

Untuk pembangunan gedung di RSUD Prambanan, Nur memastikan terus melakukan pengawasan agar bisa selesai tepat waktu. Sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, paket pembangunan ini harus selesai pada 29 Desember 2024. “Masih ada waktu pengerjaan hingga kontrak berakhir,” katanya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sleman, Haris Martapa, mengatakan tahun ini ada 10 paket strategis daerah. Program pembangunan yang dilaksanakan menasar ke akses infrastruktur jalan, layanan kesehatan hingga pendidikan. “Harus selesai di akhir 2024,” kata Haris.

Guna menyelesaikan program ini selesai tepat waktu, maka terus dilakukan upaya pengawasan. Selain itu, monitoring tersebut juga untuk memastikan pembangunan yang terlaksana sesuai dengan perencanaan. “Pengawasan terus dilakukan, karena memang ada proyek yang baru selesai di akhir tahun,” katanya.